

**Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Dalam Pengembangan
Industri Kecil Menengah (IKM)**

Oleh :

Muhammad Zacky



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Dalam Pengembangan
Industri Kecil Menengah (IKM)**

Oleh: Muhammad Zacky

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIAL**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Oleh

Muhammad Zacky

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kota Bandar Lampung, yang masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, akses pasar, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung produk lokal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Dinas Perindustrian dalam pengembangan IKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan dan pendampingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap 5 informan yang terdiri dari 2 pegawai Dinas Perindustrian dan 3 pelaku IKM yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian tidak lagi terbatas pada fungsi administratif, melainkan telah bertransformasi sebagai agen struktural yang membentuk dan mengarahkan praktik ekonomi pelaku IKM melalui pembinaan, fasilitasi legalitas, serta perluasan akses pasar. Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, dinamika ini mencerminkan adanya relasi dualitas antara struktur (kebijakan, program, dan regulasi pemerintah) dan agen (pelaku IKM dan masyarakat), di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk keberlangsungan praktik ekonomi. Namun demikian, efektivitas interaksi tersebut masih dihambat oleh faktor sosial seperti rendahnya daya beli masyarakat, terbatasnya kolaborasi antar pelaku usaha, serta ketergantungan pada intervensi pemerintah. Oleh karena itu, penguatan hubungan timbal balik antara struktur dan agen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem IKM yang adaptif, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Kata Kunci: Industri Kecil dan Menengah (IKM), Peran Dinas Perindustrian, Teori Strukturasi

ABSTRACT

The Role of the Department of Industry of Bandar Lampung City in the Development of Industri Kecil Menengah (IKM)

By

Muhammad Zacky

The development of Industri Kecil Menengah (IKM) represents a strategic element in driving regional economic growth, particularly in Bandar Lampung City, which still faces various challenges such as limited capital, low quality of human resources, restricted market access, and low public participation in supporting local products. This study aims to analyze the role of the Department of Industry in the development of IKM and to identify factors influencing the effectiveness of guidance and assistance programs. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving 5 informants, consisting of 2 officials from the Department of Industry and 3 IKM actors selected purposively based on their direct involvement in development programs. The findings indicate that the role of the Department of Industry is no longer limited to administrative functions but has transformed into a structural agent that shapes and directs the economic practices of IKM actors through capacity building, legal facilitation, and market access expansion. From the perspective of Anthony Giddens' structuration theory, this dynamic reflects the duality relationship between structure (policies, programs, and government regulations) and agency (IKM actors and society), where both continuously interact and influence the sustainability of economic practices. However, the effectiveness of this interaction is still constrained by social factors such as low public purchasing power, limited collaboration among business actors, and dependence on government intervention. Therefore, strengthening the reciprocal relationship between structure and agency is essential to creating an adaptive, independent, and sustainable IKM ecosystem, enabling it to contribute optimally to local economic development.

Keywords: Industri Kecil Menengah (IKM), Role of Government, Structuration Theory

Judul Skripsi : **Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung
Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah
(IKM)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Zacky**

Nomor pokok Mahasiswa : **2256011006**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Anita Damayantie, M.H.
NIP. 196903041994032002

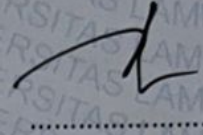
2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
NIP. 197704012005012003

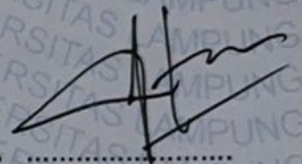
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Anita Damayantie, M.H.**



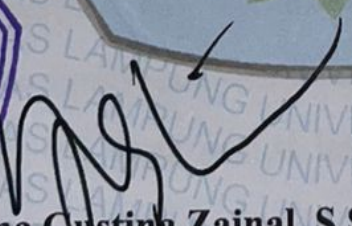
Penguji Utama : **Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Ujian Sidang Skripsi: 13 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung 13 April 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zacky
NPM. 2256011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Zacky, lahir di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 3 Agustus 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari buah hati Bapak Agus Donanto, dan Ibu Dian Anggraini. Riwayat Pendidikan penulis di mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Tunas Mekar Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School dan berhasil selesai pada tahun 2018. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Global Madani dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Penulis diterima melalui jalur mandiri sebagai mahasiswa di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gandri, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Periode 1 Tahun 2025 selama 30 hari. Selain itu, penulis juga melaksanakan magang di Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung selama lima bulan pada tahun 2025.

MOTO

"Semua orang memiliki gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggu giliranmu!"

(Gol D Roger)

"Tidak ada manusia yang lahir untuk sendirian didunia ini, jika terasa berat maka tertawalah."

(Jaguar D Saul)

"Selesaikan apa yang sudah di mulai."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber inspirasi dan teladan dalam setiap langkah kehidupan. Berkat hal tersebut, penulis mampu menjalani proses belajar dan bekerja keras hingga skripsi ini terselesaikan.

Dengan hati yang rendah penulis memberikan persembahan kepada:

Kepada Orang Tua tercinta

Ayahku Donanto dan Ibuku Dian

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban, dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan.

Kepada Adek alm M. Zhafar Marsa Adianto

Yang sudah Menemani masa kecil saya walau sekarang sudah tidak bersama tapi nama dan kenangannya akan selalu abadi di hati.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis merasakan bahwa dalam menjalankan kehidupan harus memiliki rintangan untuk bangkit.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul "Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penyusunan karya ini merupakan perjalanan yang penuh pembelajaran dan pengalaman berharga. Dalam setiap tahapnya, penulis menyadari bahwa pengetahuan tidak hanya tumbuh dari teori dan tulisan, tetapi juga dari pengalaman nyata, percakapan, serta interaksi sosial yang dijalani dengan kesungguhan. Penulis memahami bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, namun setiap kekurangannya menjadi bagian dari proses belajar dan upaya untuk terus memperdalam pemahaman.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, penulis memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat, kesehatan, kekuatan, dan keteguhan hati yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kemudahan, jalan keluar, serta kesempatan yang hadir dalam perjalanan ini merupakan wujud kasih sayang dan kehendak-Nya yang selalu membersamai setiap langkah penulis. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik hingga tahap akhir..

2. Kepada kedua orang tua, Ayah Donan dan Ibu Dian yang selalu menjadi rumah dan tempat kembali dalam setiap keadaan penulis. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kesabaran dalam menghadapi setiap keluh kesah penulis, serta dukungan yang diberikan tanpa syarat. Nasihat, perhatian, serta pengorbanan yang diberikan menjadi dorongan utama bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan proses ini hingga akhir. Setiap pencapaian dalam hidup penulis tidak lepas dari pengorbanan, kerja keras, dan kepercayaan yang ayah dan ibu tanamkan sejak awal. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Kesehatan dan kebahagiaan kepada ayah dan ibu. Skripsi ini adalah salah satu bentuk kecil dari usaha penulis untuk membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
3. Kepada adek penulis, Zhafar terima kasih atas kenangan masa kecil nya serta berbagi kebahagiaannya. Walau sekarang sudah tidak di samping saya tapi saya sangat yakin adek Zhafar sangat mendukung dan bangga terhadap saya karena telah menyelesaikan perkuliahannya dan bisa membahagiakan ayah dan ibu kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adek Zhafar karena pernah ada dalam hidup saya maaf kalo belum bisa menjadi kakak yang baik semasa hidup.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
7. Bapak Junaidi, S.Pd., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi
8. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas ilmu, arahan, serta

perhatian yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat menghargai kesabaran Ibu dalam membimbing setiap tahap penulisan, waktu yang telah diluangkan di tengah berbagai kesibukan, serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Setiap masukan dan nasihat yang Ibu sampaikan menjadi motivasi besar bagi penulis untuk terus menyempurnakan karya ini. Semoga seluruh ilmu yang telah diajarkan menjadi kebaikan yang terus mengalir dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Ibu.

9. Bapak Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembahas, penulis menyampaikan terima kasih atas ketelitian dalam membaca setiap bagian tulisan dan kesungguhan bapak dalam menelaah skripsi ini. Berbagai masukan yang bapak berikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan kekurangan, serta memperjelas bagian-bagian yang masih perlu diperkuat. Penulis juga menghargai waktu dan kesabaran bapak selama proses pembahasan berlangsung, serta sikap bapak yang bijaksana dan terbuka dalam memberikan arahan. Setiap saran yang disampaikan menjadi pembelajaran penting dan motivasi bagi penulis untuk terus berkembang memperbaiki diri. Semoga seluruh ilmu yang telah diajarkan menjadi kebaikan yang terus mengalir dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan bapak.
10. Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak pernah mempersulit ketika hendak ditemui ketika ada masalah dalam akademik selama penulis menjalankan studi di Jurusan Sosiologi.
11. Seluruh dosen di Jurusan Sosiologi, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya yang dengan penuh dedikasi telah membagikan ilmu, arahan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga seluruh ilmu yang telah diajarkan menjadi kebaikan yang terus mengalir dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kehidupan Bapak dan Ibu.

12. Kepada staf administrasi Jurusan Sosiologi, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan sejak masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Bantuan serta respons yang cepat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi sangat membantu penulis dalam menjalani setiap tahapan dengan lancar.
13. Kepada teman-teman pertamaku yang dari awal masuk kuliah di Jurusan Sosiologi yaitu. Adit, Razik, Fadlih, Aga, Lutfhi, Alif, Banyoe. Terima kasih telah menjadi bagian dari langkah awal perjalanan ini. Kebersamaan yang terjalin sejak semester pertama hingga sekarang menjadi kenangan yang sangat berarti. Kehadiran kalian membuat masa-masa awal kuliah terasa lebih hangat dan penuh warna. Terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan, terutama saat penulis merasa lelah atau menghadapi kesulitan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Semoga ke depan kita semua dapat meraih cita-cita yang diimpikan dan tetap saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan yang akan kita tempuh.
16. Kepada teman-teman seperguruan saya yaitu: Mas Ade, Mas Rama, Mas Zidan, Lucky, Atung, Rafly, Abid. penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan dan kebaikanmu. Terima kasih karena telah sabar menemani, mendengarkan setiap keluhan, terima kasih atas kebersamaan selama masa proses penyusunan skripsi ini. Setiap momen yang kita lewati bersama menjadi bagian penting dalam proses panjang menyelesaikan studi. Terima kasih karena telah sabar menemani, dan mendengarkan setiap keluhan. Semoga ke depan kita dapat meraih cita-cita yang diimpikan dan tetap saling menguatkan dalam setiap langkah kehidupan yang akan kita tempuh.
17. Kepada Nurbaiti, yang telah menemani sejak awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dalam mendengarkan keluhan, atas dukungan dan motivasi yang terus diberikan. Terima kasih atas perhatian, dan usaha, dalam mendampingi penulis di berbagai keadaan, baik saat segala hal terasa ringan maupun ketika terasa begitu berat. Semoga setiap

kebaikan yang kamu berikan mendapatkan balasan terbaik, dan semoga langkahmu ke depan selalu dipenuhi keberhasilan dan kebahagiaan.

18. Teman-teman Mahasiswa/i Sosiologi Angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung;

20. Terakhir sebelum penulis akhiri, "*Hadapi semuanya langsung di muka apapun yang terjadi tidak apa*" kalimat tersebut yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini.

21. Teruntuk penulis, Zacky, terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi laki - laki yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang di hadapi. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala kebaikan dari bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, serta menjadikannya amal ibadah yang mulia di sisi-Nya, Allahumma Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 13 April 2026

Penulis

Muhammad Zacky

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang...	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
A. Manfaat Teoritis.....	5
B. Manfaat Praktis	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peran dan fungsi Dinas Perindustrian.	7
2.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan IKM.....	10
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
2.4 Landasan Teori Strukturasi Anthony Giddens	15
2.5 Alur Berpikir	16
III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Tipe Penelitian.....	19
3.2 Lokasi Penelitian	20
3.3 Fokus Penelitian	20
3.5 Sumber Data.....	21
3.4 Kriteria Informan.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	25

IV GAMABARAN UMUM	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.2 Gambaran Umum Dinas perindustrian	28
4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian	30
4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian	31
4.4 Gambaran Umum Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung.....	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Profil Informan	37
5.2 Hasil Penelitian.....	40
5.2.1 Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).....	40
5.2.1.1 Peran Dinas Perindustrian Sebagai Pembina Usaha	42
5.2.1.2 Peran Institusional dan Administratif	61
5.2.1.3 Ketergantungan dan Kemandirian Pelaku IKM dalam Program Pembinaan Dinas Perindustrian	66
5.2.2 Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pendampingan IKM oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.....	71
5.2.2.1 Pola Komunikasi.....	71
5.2.2.2 Partisipasi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).....	75
5.2.2.3 Dukungan Pemerintah.....	79
5.2.2.4 Partisipasi dan Dukungan Masyarakat Melalui Daya Beli Masyarakat	83
5.2 Pembahasan.....	87
5.3.1 Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	87
5.3.2 Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pendampingan IKM Oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung .	89
VI. Kesimpulan dan Saran	92
6.1 kesimpulan.....	92
6.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Profil Informan.....	38
Tabel 2 Peran Dinas Perindustrian Sebagai Pembina Usaha	47
Tabel 3 Pelatihan Keterampilan Usaha	50
Tabel 4 Bantuan Peminjaman Modal Usaha.....	53
Tabel 5 Peminjaman Alat Dan Barang Pendukung Produksi	56
Tabel 6 Program Wisata Kuliner.....	60
Tabel 7 Peran Institusional dan Administratif	65
Tabel 8 Ketergantungan dan Kemandirian Pelaku IKM dalam Program Pembinaan Dinas Perindustrian	69
Tabel 9 Faktor Pola Komunikasi	74
Tabel 10 Partisipasi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).....	78
Tabel 11 Dukungan Pemerintah.....	81
Tabel 12 Partisipasi dan Dukungan Masyarakat Melalui Daya Beli Masyarakat ..	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka berpikir penelitian	18
Gambar 2 Dinas perindustrian Kota Bandar lampung	29
Gambar 3 Payung bantuan Dinas Perindustrian	30
Gambar 4 Kunjungan langsung ke rumah produksi keripik	44
Gambar 5 Program wisata kuliner	45
Gambar 6 Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian	61
Figure 7 Pembinaan administrasi oleh Dinas Perindustrian	63

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam kemajuan sektor ekonomi di Indonesia. Industri kecil dan menengah tidak hanya menjadi salah satu sumber lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, industri kecil dan menengah memiliki peran besar dalam meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia. Industri kecil dan menengah adalah bentuk usaha dagang kecil yang dibuat oleh masyarakat dengan inisiatif sendiri. IKM tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan pengolahan potensi lokal (Wahyudi, 2022).

Peran penting usaha kecil dan menengah dalam pengembangan perekonomian nasional terlihat dari adanya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil dan menengah harus dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Inti dari peraturan tersebut adalah adanya pengakuan dan upaya untuk memberdayakan mereka (Republik Indonesia, 2008).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) terdiri dari dua jenis. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang memproses barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, atau barang dengan nilai rendah menjadi barang dengan nilai lebih tinggi, dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Sementara itu, industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang melakukan proses serupa, tetapi dengan jumlah tenaga kerja

antara 20 sampai 99 orang (Alfarisi & Sitania, 2024). Secara nasional, IKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, terdapat 4,52 juta unit usaha IKM yang mencakup 99,7 persen dari total industri di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60 persen yang telah terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sedangkan sisanya masih beroperasi secara informal (Fauzan, 2025).

Di Kota Bandar Lampung, dalam lima tahun terakhir terus terjadi tren positif. Menurut data Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, pada tahun 2020 terdapat 310 unit IKM resmi. Hingga tahun 2025, jumlahnya meningkat mencapai 716 unit. Dari total 716 IKM yang terdaftar, terdapat 633 unit yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 160 unit memiliki Sertifikat SIINas, 102 unit sudah bersertifikasi halal, 20 unit mengantongi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan 73 unit memiliki izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha IKM di Kota Bandar Lampung, masih ada perbedaan antara usaha IKM yang sudah terdaftar secara resmi dan usaha yang belum mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian. Hal ini membuat munculnya pertanyaan tentang sejauh mana peran dinas dalam mengembangkan usaha IKM, baik dalam hal administrasi, bimbingan, maupun penguatan usaha.

Meskipun jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemanfaatan program pembinaan secara optimal. Masih ditemukan pelaku IKM yang belum memiliki legalitas usaha, belum terdaftar sebagai binaan, serta belum memahami secara menyeluruh manfaat pendampingan yang disediakan oleh Dinas Perindustrian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan program pembinaan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah dengan praktik yang dijalankan oleh pelaku IKM di lapangan.

Secara ideal, semakin banyak IKM yang ada, semakin banyak pula pelaku usaha yang memiliki legalitas resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai tanda

bahwa mereka terlibat dalam program pembinaan yang disediakan pemerintah. Namun, di lapangan terlihat bahwa meskipun jumlah IKM yang terdaftar dan terlibat dalam program pembinaan dari Dinas Perindustrian sudah cukup besar, masih ada sebagian pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan program pembinaan serta pengurusan legalitas usaha belum merata, dan masih ada kendala dalam kesadaran serta pemahaman pelaku IKM akan pentingnya memiliki legalitas sebagai dasar untuk berkembang.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan karena banyak pelaku usaha IKM, belum memiliki legalitas makanan seperti sertifikasi PIRT dan sertifikasi Halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kota Bandar Lampung. Pemilihan informan didasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu orang-orang yang secara langsung terlibat dalam masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi sumber (Suganda & Eriyanti, 2024).

Peran Dinas Perindustrian dalam Industri kecil dan menengah adalah sebagai salah satu pendorong Industri Kecil Menengah untuk lebih maju dan berkembang . Peran Dinas Perindustrian dalam kehidupan adalah sebagai penyerap tenaga kerja, penghasil barang dengan devisa negara yang potensial. Jadi intinya perkembangan IKM yang ada dalam masyarakat tidak terlepas adanya peran Dinas Perindustrian sebagai lembaga pengawas sekaligus sebagai lembaga yang memfasilitasi IKM (Nurhayati, 2018). Dari sudut pandang sosiologi, peran Dinas Perindustrian tidak hanya dianggap sebagai lembaga administratif yang menjalankan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang terlibat dalam proses pemberdayaan industri kecil dan menengah. Dinas Perindustrian bekerja sebagai pelaku perubahan sosial yang berusaha meningkatkan kemampuan para pelaku IKM melalui pembinaan, pelatihan, serta membantu akses mereka terhadap sumber daya ekonomi (Riyan Tika Syafitri, 2023).

Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi pusat pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Lampung, dengan

peningkatan jumlah usaha yang cukup besar. Namun, di sisi lain, masih banyak pelaku IKM yang belum secara maksimal memanfaatkan program pembinaan dan legalitas usaha yang disediakan oleh Dinas Perindustrian. Kondisi ini membuat Kota Bandar Lampung relevan untuk diteliti mengenai peran Dinas Perindustrian, kebijakan pembinaan, serta praktik yang dilakukan pelaku IKM di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran pemerintah dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagian besar masih berfokus pada program pembinaan, bantuan usaha, dan kontribusi ekonomi secara umum. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengkaji secara mendalam bagaimana program tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku IKM di lapangan. Selain itu, masih terbatas kajian yang menyoroti adanya perbedaan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait kepemilikan legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berperan dalam membantu pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), termasuk dalam mempromosikan produk-produk IKM di daerah tersebut. IKM di Bandar Lampung sulit bertahan jika tidak ada bantuan dari pemerintah, karena sebagian besar usaha IKM menghasilkan barang konsumsi yang memiliki daya tahan terbatas, serta memiliki keterbatasan sumber daya yang membuat produknya tidak bisa menjangkau pasar yang lebih luas (Vivaldy, 2023).

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan program bimbingan dan pengembangan IKM, seperti hubungan sosial antara pengusaha dengan aparatur pemerintah, tingkat keterlibatan masyarakat, serta hubungan kepercayaan yang terjalin antara kedua pihak. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial masyarakat pelaku IKM, seperti pola interaksi, solidaritas, dan partisipasi sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan IKM oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh terkait hal berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan IKM oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sosiologi Pembangunan dan Sosiologi Ekonomi. Penelitian ini berupaya untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana peran lembaga pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana

kebijakan administratif, tetapi juga sebagai aktor sosial yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hasil penelitian ini diyakini dapat memperkuat teori-teori sosiologis yang menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan agen perubahan sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Giddens dalam teori strukturasi, di mana lembaga pemerintah dan pelaku IKM saling memengaruhi dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Dengan ini, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang dinamika sosial yang terjadi di balik implementasi kebijakan ekonomi dan program pemberdayaan, yang sering kali diabaikan dalam kajian-kajian yang bersifat administratif atau ekonomi semata.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung maupun pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan strategis dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan IKM yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami berbagai hambatan sosial yang muncul dalam proses pelaksanaan program pembinaan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, atau lemahnya koordinasi antar instansi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran dan fungsi Dinas Perindustrian.

Menurut Nurhayati (2018) Dinas perindustrian memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi tempat kerja bagi banyak orang, menghasilkan barang dengan harga terjangkau untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan negara melalui ekspor. Dengan industri kecil dan menengah yang berkualitas, struktur ekonomi akan lebih kuat, yang membantu meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan kemampuan sendiri. Industri kecil dan menengah memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

Menurut sucitra et al (2024) fungsi dari Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi tempat kerja bagi banyak orang, menghasilkan barang dengan harga terjangkau untuk kebutuhan masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan negara melalui ekspor. Dengan industri kecil dan menengah yang berkualitas, struktur ekonomi akan lebih kuat, yang membantu meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berdasarkan kemampuan sendiri. Industri kecil dan menengah memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

Selain itu ada beberapa program Dinas Perindustrian yaitu pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal melalui pinjaman, peminjaman alat dan barang pendukung produksi, program wisata kuliner, serta peran institusional dan administratif.

1. Pelatihan keterampilan usaha

Laila (2024) menegaskan bahwa pelatihan keterampilan merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku IKM. Melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk Dinas Perindustrian, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pelatihan keterampilan memungkinkan tenaga kerja untuk meningkatkan pengalaman serta mengembangkan kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha

2. Pemberian bantuan modal melalui pinjaman

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan modal tersebut sering menyebabkan pelaku usaha tidak mampu memenuhi permintaan pasar meskipun permintaan terhadap produk mereka mengalami peningkatan. Selain itu, banyak pelaku usaha kecil yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai prosedur pengajuan bantuan permodalan serta keterbatasan kemampuan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam membantu perkembangan usaha kecil. Karena itu, peran pemerintah melalui Dinas Perindustrian menjadi penting dalam memberikan dukungan berupa bantuan permodalan agar pelaku IKM lebih berdaya saing dan berkelanjutan (Ekonomika et al., 2012)

3. Peminjaman alat dan barang pendukung produksi

Program peminjaman bantuan peralatan produksi difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian. Pemerintah dapat menyediakan berbagai jenis mesin dan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri kecil, seperti alat pengolahan makanan, peralatan kerajinan, atau mesin produksi lainnya. Bantuan peralatan ini biasanya dari anggaran pemerintah daerah maupun program pemberdayaan industri yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku IKM di daerah. Program tersebut juga menjadi salah satu strategi pemerintah

untuk memperkuat sektor industri kecil agar mampu berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah (Pemerintah Kabupaten Purbalingga, 2020).

4. Wisata kuliner

Mirani (2021) wisata kuliner merupakan salah satu program yang sering diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Untuk mendukung pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Kegiatan ini biasanya berbentuk festival kuliner, bazar makanan, atau sentra wisata kuliner yang melibatkan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta IKM sebagai peserta utama. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk kuliner lokal kepada masyarakat luas sekaligus meningkatkan penjualan produk. Selain itu, wisata kuliner juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas kuliner daerah serta menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah.

5. Peran institusional dan administratif.

Dinas Perindustrian memiliki peran institusional dan administratif dalam mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas usaha dan sertifikasi produk. Dengan pendampingan teknis dan administratif, pelaku IKM diberikan bantuan dalam proses pengurusan dokumen usaha yang sebelumnya sering dianggap rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun hal seperti, pemanfaatan sistem digital seperti SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) juga sangat membantu mempercepat proses pendataan industri serta pengajuan dokumen legalitas. Dengan adanya sistem tersebut, proses registrasi industri dan pengurusan legalitas produk dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengakses layanan pemerintah (Bay et al., 2025).

2.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan IKM.

1. Pola Komunikasi

Komunikasi pemasaran merupakan proses penting yang melibatkan penyampaian informasi mengenai produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan membangun kesadaran, minat, dan preferensi yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya keputusan pembelian. Komunikasi pemasaran tidak hanya mencakup kegiatan periklanan, tetapi juga promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, serta pemasaran langsung. Dalam konteks pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), komunikasi pemasaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha karena melalui komunikasi yang efektif pelaku IKM dapat memperkenalkan produk, membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, pola komunikasi yang baik dalam kegiatan pemasaran dapat membantu pelaku IKM meningkatkan daya saing dan mendukung perkembangan usaha secara lebih optimal. (Food et al., 2024)

2. Partisipasi Pelaku IKM (Industri Kecil Menengah)

Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Hartono & Moeis, 2025), partisipasi pelaku IKM juga berperan dalam memperkuat jaringan usaha dan meningkatkan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Melalui partisipasi dalam organisasi usaha atau koperasi, pelaku IKM dapat memperoleh informasi mengenai akses pasar, akses permodalan, serta berbagai program pengembangan usaha yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka.

3. Dukungan Pemerintah

Peran pemerintah dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam beberapa fungsi utama, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana pembangunan. Sebagai stabilisator, pemerintah berperan menjaga kondisi yang stabil bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai inovator, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan dan program baru yang dapat mendorong perkembangan usaha masyarakat. Selain inovator, pemerintah juga berperan sebagai modernisator yang mendorong masyarakat menuju pola kehidupan dan usaha yang lebih maju, serta sebagai pelopor yang memberikan contoh dalam

pelaksanaan pembangunan. Dalam peran lain, pemerintah juga berperan sebagai pelaksana berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pengembangan IKM (Wardani, 2016).

4. Partisipasi dan dukungan masyarakat melalui daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat dukungan masyarakat terhadap perkembangan usaha kecil. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan individu atau rumah tangga dalam membeli barang dan jasa yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga barang, serta kondisi ekonomi secara umum. Jika daya beli masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap produk usaha kecil juga cenderung meningkat sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha. Begitupun sebaliknya, jika ada penurunan daya beli masyarakat dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan produk dan menurunkan pendapatan usaha kecil (Islam et al., 2025).

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bacaan penelitian yang memiliki tema dan substansi penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa pada tahun 2022 dalam artikel yang berjudul “Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)”

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman, Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa pada tahun (2022). Mengkaji mengenai pentingnya Legalitas yang mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti formalitas keberadaan usaha, serta Izin Usaha Industri (IUI) sebagai legitimasi pelaku usaha di sektor industri. Peneliti menyoroti dua dasar hukum utama yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang memberikan penguatan pada tata kelola sektor industri nasional berbasis daya saing dan keberlanjutan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

yang memperkenalkan sistem Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara nasional untuk memfasilitasi penerbitan izin usaha dari pemerintah pusat dan daerah secara lebih cepat, mudah, dan transparan.. Kedua regulasi ini dipahami sebagai kerangka hukum yang mempermudah pelaku IKM untuk memasuki sektor formal dan mengakses berbagai bentuk fasilitasi dari negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber dari kalangan pelaku IKM dan pejabat dinas, serta melakukan kajian dokumen terhadap peraturan dan kebijakan terkait. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki dinamika sosial-ekonomi cukup unik, dengan campuran antara pelaku usaha mikro tradisional dan pelaku IKM berbasis pariwisata serta ekspor. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara kebijakan legalisasi usaha yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dengan kondisi riil di lapangan. Banyak pelaku IKM, khususnya yang berada di sektor informal dan di daerah pedesaan, belum mengerti secara utuh apa itu NIB, bagaimana cara memperolehnya, dan mengapa legalitas penting. Mereka masih mengandalkan pendekatan informal dalam menjalankan usaha, dan bahkan merasa terbebani dengan urusan administratif, walaupun prosesnya telah diklaim lebih sederhana melalui sistem OSS. Selain itu, keterbatasan akses informasi, kapasitas literasi digital, serta minimnya pendampingan langsung dari pemerintah daerah menjadi penghambat utama dalam proses legalisasi ini. (Oktaviani & Yasa, 2022)

Bedanya penelitian Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa (2022) dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian. Penelitian Ni Nyoman lebih menekankan pada pentingnya legalitas usaha serta hambatan yang dihadapi pelaku IKM dari sisi kebijakan dan pemahaman administratif. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya melihat legalitas sebagai masalah utama, tetapi juga mengkaji lebih luas mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian dalam proses pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan IKM, serta bagaimana hubungan

sosial, tingkat kepercayaan, dan interaksi antara pelaku usaha dengan pemerintah memengaruhi pemanfaatan program yang ada.

2. Penelitian kedua karya Riyan Tika Syafitri, Nazaki, Ryan Anggria Pratama 2022, berjudul “PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEMAJUKAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022”

Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Tika Syafitri, Nazaki, Ryan Anggria Pratama(2023). Peneliti menyoroti bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan para pelaku usaha melalui pelatihan, akses modal, dan bimbingan dalam pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun pelaksanaannya belum merata dan masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala administratif, kurangnya informasi tentang legalitas usaha, serta minimnya dukungan dalam pemasaran berbasis digital.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran penting terkait pemberdayaan UMKM, tetapi masih terdapat celah dalam penelitian karena belum membahas secara spesifik peran Dinas Perindustrian sebagai lembaga teknis dalam pengembangan industri kecil menengah (IKM), terutama terkait akses legalitas seperti NIB, IUI, serta SIINas, serta belum memperhatikan dinamika sosial yang memengaruhi efektivitas program bimbingan dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian dengan meneliti secara mendalam peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam pengembangan IKM, baik dari segi pembinaan administrasi, fasilitas produksi, pemasaran, hingga dinamika sosial yang membentuk hubungan antara pemerintah daerah dan pelaku IKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara empiris maupun teoritis dalam penguatan strategi pengembangan IKM di tingkat daerah agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian Riyan Tika Syafitri, Nazaki, dan Ryan Anggria Pratama (2023) dengan penelitian saya terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian tersebut lebih menekankan pada peran umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memajukan IKM melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran, serta mengidentifikasi kendala yang bersifat administratif dan teknis. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya melihat peran tersebut secara umum, tetapi lebih spesifik mengkaji peran Dinas Perindustrian sebagai lembaga teknis dalam pengembangan IKM, terutama dalam aspek legalitas usaha seperti NIB, PIRT, halal, dan SIINas. Selain itu, penelitian saya juga menyoroti kesenjangan antara program yang dirancang dengan praktik di lapangan, serta mengkaji faktor-faktor sosial seperti tingkat pemahaman, kesadaran, dan hubungan antara pelaku IKM dengan pemerintah.

3. Penelitian ketiga oleh Muh. Ridwan, Hartutiningsih, Mass'ad Hatuwe (2017) berjudul "Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang".

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ridwan, Hartutiningsih, dan Mass'ad Hatuwe (2017). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas cara pemerintah daerah melatih dan membantu pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bontang. Bantuan yang diberikan mencakup pelatihan keterampilan, bantuan dalam mempromosikan produk, bimbingan dalam pengelolaan bisnis dan pemasaran, upaya mencari pasar yang lebih luas, penyediaan dana pinjaman, serta dukungan untuk mendapatkan sertifikasi halal sebagai tanda kualitas produk. Penelitian ini dilakukan dengan metode lapangan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengamati langsung, berbicara mendalam dengan pemilik IKM dan pegawai pemerintah, serta menganalisis kebijakan dan program pembinaan yang sudah dijalankan.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya mendukung pengembangan industri kecil menengah oleh pemerintah daerah sudah memberikan dampak positif, seperti meningkatnya keterampilan para pelaku usaha dan peningkatan akses pasar lokal, tetapi pelaksanaannya masih kurang memuaskan. Hal ini terjadi karena

batasan anggaran yang dimiliki pemerintah, kurangnya tenaga pengelola yang memiliki kemampuan teknis yang cukup, serta rendahnya kemampuan para pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional.

Perbedaan antara penelitian Muh. Ridwan, Hartutiningsih, dan Mass'ad Hatuwe (2017) dengan penelitian saya terletak pada fokus kajian dan sudut pandang analisis. Penelitian tersebut lebih menekankan pada bentuk pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah serta dampaknya terhadap peningkatan keterampilan dan akses pasar pelaku IKM, sekaligus mengidentifikasi kendala yang bersifat internal seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga teknis, dan rendahnya kemampuan manajerial pelaku usaha. Sementara itu, penelitian saya tidak hanya melihat bentuk pembinaan dan kendalanya, tetapi lebih jauh mengkaji peran Dinas Perindustrian secara menyeluruh, khususnya dalam aspek legalitas usaha (seperti NIB, PIRT, halal, dan SIINas) serta kesenjangan antara program pembinaan dengan praktik di lapangan. Selain itu, penelitian saya juga menggunakan pendekatan sosiologis dengan menyoroti faktor-faktor sosial seperti tingkat kesadaran, pemahaman, dan hubungan antara pelaku IKM dengan pemerintah, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2.4 Landasan Teori Strukturasi Anthony Giddens

Dalam penelitian Abdul Firman Ashaf (2006) di jelaskan, Menurut Anthony Giddens, Struktur dalam kehidupan sosial memiliki dua sisi, yaitu bisa membantu seseorang untuk melakukan sesuatu dan sekaligus bisa membatasi apa yang bisa dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak berubah, melainkan terus berubah seiring dengan tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, struktur tidak dilihat sebagai aturan yang tetap seperti dalam pendekatan strukturalisme, dan juga bukan sistem yang sudah pasti seperti yang dijelaskan dalam fungsionalisme. Sebaliknya, struktur selalu berinteraksi dalam proses timbal balik dengan tindakan manusia, sehingga setiap kegiatan sosial bisa membentuk, mengubah, atau bahkan menggantikan struktur itu.

Dengan kata lain, tindakan individu dan struktur saling memengaruhi secara dinamis dalam menciptakan realitas sosial yang terus berkembang.

Menurut Anthony Giddens, struktur dalam kehidupan sosial memiliki sifat ganda (*duality of structure*), yaitu sebagai sesuatu yang dapat membatasi sekaligus memungkinkan tindakan individu. Struktur tidak bersifat kaku, melainkan terus terbentuk dan berubah melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, hubungan antara struktur dan agensi bersifat timbal balik, di mana tindakan individu dapat memengaruhi struktur, dan struktur pada saat yang sama memengaruhi tindakan individu. Selain itu, Giddens juga menekankan konsep agensi, yaitu kemampuan individu untuk bertindak secara sadar, beradaptasi, serta merespons aturan yang ada, termasuk melalui *dialectic of control*, yaitu kemampuan individu untuk menegosiasikan atau bahkan menghindari kontrol struktur.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dipahami sebagai struktur yang menyediakan kebijakan, program pembinaan, serta fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku IKM. Sementara itu, pelaku IKM diposisikan sebagai agen yang memiliki kemampuan untuk merespons struktur tersebut, baik dengan memanfaatkan program yang ada, menyesuaikan diri, maupun tidak mengikutinya. Interaksi antara struktur dan agen ini terlihat dari masih adanya pelaku IKM yang belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, meskipun pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui berbagai program.

2.5 Alur Berpikir

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan bagian penting dalam perekonomian Indonesia. IKM membantu meningkatkan pendapatan dan menciptakan banyak pekerjaan. Di Kota Bandar Lampung, perkembangan IKM semakin baik setiap tahunnya, meskipun masih ada beberapa masalah, seperti masih banyak usaha yang tidak memiliki izin resmi, kurangnya kemampuan manajemen, minimnya pemahaman tentang teknologi digital, dan akses pasar yang belum cukup

baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku IKM mendapatkan bantuan dan pengawasan yang sama dari Dinas Perindustrian, yang bertugas untuk mendukung perekonomian Masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologi, perkembangan IKM bukan hanya masalah administrasi atau ekonomi, tetapi juga hasil dari hubungan sosial antara kebijakan pemerintah (struktur) dan tindakan para pengusaha (agensi). Berdasarkan teori Strukturasi oleh Anthony Giddens, keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada sejauh mana struktur bisa mendukung tindakan sosial, serta kemampuan para pelaku usaha dalam menerima, menyesuaikan, atau menolak aturan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perkembangan IKM dianggap sebagai proses sosial yang saling mempengaruhi antara pemerintah dan para pelaku usaha melalui kegiatan sehari-hari mereka.

Penelitian ini didasari oleh pemahaman bahwa keberhasilan tugas Dinas Perindustrian dalam membangun IKM tidak hanya dilihat dari program yang diberikan, tetapi juga dari tingkat penerimaan, partisipasi, dan interaksi antara dinas dengan pelaku IKM. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana peran Dinas Perindustrian dijalankan, seperti pembinaan, bantuan, pelayanan legalitas usaha, serta membuka akses pasar. Penelitian ini juga mencari faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran empiris tentang hubungan antara struktur dan agensi dalam pengembangan IKM di Kota Bandar Lampung, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam mendukung atau menghambat efektivitas proses pendaftaran IKM di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan bisa mengenali faktor-faktor sosial yang membantu atau menghalangi keberhasilan proses pendaftaran dan pembinaan UMKM. Selain itu, penelitian ini membahas bagaimana hubungan, komunikasi, dan tingkat kepercayaan antara pengusaha dengan Dinas Perindustrian mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini membantu memperjelas peran lembaga pemerintah sebagai pelaku

perubahan sosial serta memberikan dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pemberdayaan UMKM di masa depan.

Adapun Kerangka pikir digambarkan dalam tabel berikut:



Gambar 1 Kerangka berpikir penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui studi kasus, seperti yang dijelaskan oleh (Yin 2009). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan dan memahami secara mendalam dinamika sosial terkait peran Dinas Perindustrian dalam pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung sebagai suatu kasus dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan, sehingga bisa mengungkap interaksi sosial, bentuk bantuan yang diberikan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat peran dinas dalam pemberdayaan IKM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana kebijakan sebagai struktur dan pelaku IKM sebagai agen saling memengaruhi dalam praktik sosial sehari-hari.

Menurut Moleong (2010), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan mendalam melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, serta perilaku dalam situasi yang alami dan utuh. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan, menafsirkan, dan mengonstruksi makna dari berbagai bentuk data yang diperoleh di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana peran Dinas Perindustrian terbentuk, dijalankan, serta dipersepsikan oleh pelaku IKM, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai dinamika sosial dalam pengembangan IKM di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga mampu mengungkap bagaimana

interaksi, negosiasi, serta bentuk penerimaan dan resistensi pelaku usaha terhadap berbagai kebijakan pembinaan dan legalitas usaha yang diterapkan pemerintah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena Dinas Perindustrian merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pembinaan, pendampingan, serta pelayanan legalitas bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah tersebut.

Selain itu, Kota Bandar Lampung memiliki jumlah IKM yang cukup besar dan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, namun masih ditemukan berbagai persoalan seperti rendahnya tingkat legalitas usaha, keterbatasan akses pasar, serta minimnya kemampuan dalam pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menjadi alasan penting dalam melakukan penelitian, karena dapat menggambarkan secara nyata dinamika sosial dan implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengembangan IKM di tingkat lokal.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan arah utama atau batasan kajian yang ditetapkan oleh peneliti untuk menghindari cakupan data yang terlalu luas dan tidak relevan. Dalam penelitian kualitatif, fokus menjadi elemen krusial untuk mengarahkan proses pengumpulan data, memilih informan, serta menyusun strategi analisis data. Menurut Sugiyono (2023), fokus dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai pedoman metodologis untuk memastikan bahwa peneliti tetap berada dalam jalur eksplorasi fenomena sosial yang tepat. Fokus tersebut tidak bersifat kaku, melainkan dapat berkembang dan disesuaikan secara dinamis sesuai dengan konteks dan temuan di lapangan. Berdasarkan konteks permasalahan dan tujuan penelitian ini, fokus diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai proses sosial yang muncul dalam hubungan antara pemerintah sebagai struktur birokrasi dan

pelaku IKM sebagai agen ekonomi masyarakat. pemahaman mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan IKM.

Fokus penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dalam pengembangan IKM, yang mencakup peran sebagai pembina usaha yang memiliki berbagai program seperti pelatihan keterampilan usaha, pembelian bantuan modal melalui pinjaman, peminjaman alat dan barang pendukung produksi, program wisata kuliner, serta peran institusional dan administratif. Menganalisis ketergantungan dan kemandirian dalam program pembinaan yang diberikan Dinas Perindustrian.
2. Faktor-Faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan IKM oleh Dinas. Seperti pola komunikasi, partisipasi pelaku IKM, dukungan pemerintah, partisipasi dan dukungan masyarakat melalui daya beli masyarakat.

3.5 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapat secara langsung dari sumbernya. Informasi yang dikumpulkan bersifat asli dan belum diproses. Data primer berasal dari sumber yang paling awal. Sumber informasi ini bisa didapat melalui wawancara atau pengumpulan data langsung kepada responden. (Harahap, 2022)

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang didapat dari hasil penelitian orang lain. Informasi ini diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya. Selain itu, ada beberapa sumber yang dikategorikan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, atau artikel yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. (Harahap, 2022)

3.4 Kriteria Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap yang sangat penting karena akan menentukan kedalaman data, keakuratan makna, dan relevansi kontekstual dari temuan yang diperoleh. Jumlah informan dalam pendekatan ini tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan prinsip *saturasi data* (*data saturation*), yakni ketika data yang diperoleh dari wawancara dan observasi telah berulang dan tidak menghasilkan informasi baru (Sugiyono, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dalam pengembangan IKM, sehingga informan dipilih secara *purposive* (sengaja) berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses tersebut, baik sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai pelaku yang merasakan dampaknya.

Berikut adalah beberapa kriteria informan penelitian dengan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pegawai Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung sebanyak 2 orang,

Dengan kriteria memiliki jabatan yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan pengembangan IKM, terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan, serta memiliki pemahaman terhadap kebijakan dan pengelolaan IKM. Informan yang dipilih terdiri dari satu orang dengan jabatan sebagai Ketua Jabatan Fungsional berinisial AZ dan satu orang dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri berinisial LS. Kedua informan ini dipilih karena mampu memberikan informasi mengenai peran Dinas Perindustrian dalam pembinaan, pendampingan, serta pengembangan pelaku IKM.

2. Pelaku IKM di Kota Bandar Lampung sebanyak 3 orang, dengan kriteria

memiliki usaha yang aktif dan berkelanjutan, bergerak di sektor industri olahan dan kerajinan, serta memiliki pengalaman dalam mengikuti maupun belum mengikuti program pembinaan serta proses pengurusan legalitas usaha. Informan terdiri dari pelaku usaha aneka keripik dengan inisial AN, tapis dengan inisial MM, dan batik tulis dengan inisial GS. Mereka dipilih karena mampu memberikan

informasi mengenai pengalaman langsung, kendala, serta persepsi terhadap peran Dinas Perindustrian dalam mendukung usaha mereka.

Informan dari pihak Dinas Perindustrian dipilih karena aparatur dinas merupakan pihak yang paling mengetahui kebijakan, program pembinaan, serta mekanisme pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan IKM. Sementara itu, pelaku IKM dipilih karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan dan program tersebut di lapangan. Dengan itu, kedua jenis informan ini diyakini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Dinas Perindustrian serta interaksi antara pemerintah dan pelaku IKM dalam proses pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung.

Jumlah informan dalam penelitian ini dianggap telah memenuhi prinsip *saturasi data*, karena data yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan pola informasi yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat kontekstual dan visual terhadap perilaku serta interaksi yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan secara partisipatif, artinya peneliti terlibat secara langsung namun tidak mengintervensi kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan di lingkungan kantor Dinas Perindustrian pada kegiatan-kegiatan pendukung seperti sosialisasi, pendampingan, dan verifikasi lapangan.

Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana proses pelayanan dilakukan, bagaimana interaksi petugas dan pelaku IKM terjadi, serta apa saja hambatan teknis dan sosial yang muncul di lapangan. Observasi juga memberikan gambaran nyata tentang sikap, ekspresi, dan respons yang

sering kali tidak diungkapkan secara verbal dalam wawancara. Data dari observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) yang disusun secara sistematis, termasuk waktu, tempat, dan kegiatan yang diamati. Observasi menjadi teknik penting dalam memperkuat data dari wawancara dan dokumentasi, serta membantu peneliti dalam memvalidasi informasi dan menemukan pola-pola sosial yang terjadi secara alami.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada informan kunci yang terdiri dari pegawai Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung serta pelaku IKM yang. Wawancara mendalam dipilih karena memberikan ruang yang luas bagi informan untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka terkait kebijakan dan mekanisme pendaftaran IKM. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang bersifat subjektif dan kontekstual, seperti kesulitan yang dialami pelaku IKM dalam melengkapi dokumen, persepsi terhadap layanan publik, serta upaya yang dilakukan oleh dinas dalam meningkatkan partisipasi IKM. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam dengan izin informan, dan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut. Pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk menjangkau dimensi administratif, sosial, dan kebijakan yang saling berkaitan. Dengan demikian, teknik wawancara ini menjadi sumber utama dalam memahami dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan proses pengembangan IKM dan kebijakan Dinas Perindustrian. Dokumen yang dikumpulkan antara lain: Peraturan Daerah (Perda) tentang IKM, *Standard Operating Procedure (SOP)* pendaftaran, formulir administrasi, daftar pelaku IKM yang telah terdaftar, laporan kegiatan tahunan

dinas, serta konten dari media sosial atau situs web resmi instansi tersebut. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran formal dan legalistik mengenai kerangka kerja Dinas Perindustrian serta menjadi bukti tertulis atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, dokumen tersebut juga dapat digunakan untuk menelusuri perubahan kebijakan dari tahun ke tahun, termasuk capaian dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data dan pelayanan publik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni peran Dinas Perindustrian dalam proses pengembangan IKM dan dinamika sosial yang menyertainya.

Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus masalah atau terlalu umum disisihkan, sementara data yang menunjukkan bentuk peran, tantangan administratif, dinamika interaksi sosial, serta respon pelaku IKM dipertahankan dan disusun ke dalam kategori tematik awal. Reduksi data tidak dilakukan hanya sekali, melainkan berlangsung sepanjang proses penelitian, mulai dari saat pengumpulan data hingga analisis akhir. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan kerumitan data lapangan sehingga lebih mudah dianalisis secara mendalam.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data digunakan mempermudah dan memahami sebagai acuan untuk mengambil Tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data. Peneliti akan menyajikan data yang akan dianalisis dan disusun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti memahami persoalan. *Display data* dilakukan dengan

cara mengelompokkan data yang sudah didapat dan menuliskannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan dengan cara melakukan transkripsi dan dijadikan tambahan hasil penelitian yang dapat menguatkan argumentasi yang didapatkan selama penelitian berlangsung, serta mampu memberikan gambaran secara lebih *riil* dikarenakan ada kutipan yang disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah seketika bila tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, ketika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan adanya bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun verifikasi dilakukan ini termasuk untuk menguji keabsahan (*validitas*) data yang didapatkan, hal tersebut akan didapatkan dengan cara *crosscheck* dengan pihak lain. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan langkah-langkah diatas, kemudian dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Lalu, kesimpulan tersebut akan diverifikasi dengan cara melihat hasil reduksi data dan *display data* sehingga tidak akan menyimpang dari permasalahan penelitian. Display data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menampilkan hasil transkripsi serta penjelasannya di bagian hasil penelitian.

IV GAMABARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Dokter Susilo No. 2, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Perindustrian merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi utama dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung. Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berperan sebagai institusi yang secara langsung merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembinaan, pendampingan, pelatihan, fasilitasi perizinan, dan pengembangan kapasitas pelaku IKM.

Selain itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung memiliki karakteristik sebagai pusat aktivitas ekonomi daerah yang ditandai dengan perkembangan sektor industri yang cukup pesat, khususnya pada kategori industri kecil dan rumah tangga sebagai bagian dari IKM. Berdasarkan data BPS (2025), jumlah industri kecil pada tahun 2024 mencapai 4.683 unit dan mengalami pertumbuhan sebesar 10,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 201 unit industri menengah dan 8.789 industri rumah tangga, sehingga total unit usaha industri di Kota Bandar Lampung mencapai 13.673 unit. Data ini menunjukkan bahwa sektor IKM memiliki basis yang kuat dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor industri kecil juga memiliki kontribusi yang besar dalam menyerap tenaga kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai sekitar

29.988 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan IKM tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha ekonomi, tetapi juga sebagai sarana dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, nilai investasi sektor industri di Kota Bandar Lampung tercatat mencapai ratusan miliar rupiah dengan nilai produksi yang tinggi, yang semakin menegaskan peran strategis sektor ini dalam struktur ekonomi daerah.

Dalam praktiknya pelaku IKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, akses pasar yang belum optimal, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Adapun hal lain, ketergantungan terhadap kegiatan promosi yang difasilitasi pemerintah menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengembangkan pasar secara mandiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki sektor IKM dengan kemampuan aktual pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan usahanya.

Dengan ini, Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menjadi lokasi yang strategis dalam penelitian ini karena tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama yang berinteraksi langsung dengan pelaku IKM dalam membentuk, mengarahkan, dan memperkuat praktik usaha di tingkat lokal. Keberadaan dinas ini menjadi penting dalam menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan realitas yang dihadapi pelaku usaha. Karena itu, lokasi penelitian ini relevan untuk menggali secara mendalam bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan serta bagaimana dinamika hubungan antara dinas dan pelaku IKM dalam proses pengembangan usaha, khususnya dalam konteks penguatan kapasitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha IKM di Kota Bandar Lampung.

4.2 Gambaran Umum Dinas perindustrian

Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berada di Jalan Dokter Susilo No.2, Sumur Batu, Kecamatan Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Dinas ini adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas mengurus

kebijakan di bidang perindustrian, yaitu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berperan sebagai pihak yang bertugas secara teknis dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah. Tugas utama dinas ini adalah mengembangkan potensi industri, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM), agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perindustrian memiliki beberapa bidang kerja, antara lain bidang pembinaan industri, bidang pengembangan produk, bidang fasilitasi pemasaran, serta bidang pengawasan mutu dan standarisasi produk. Setiap bidang saling berkoordinasi dalam mendukung tercapainya tujuan pengembangan IKM yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.



Gambar 2 Dinas perindustrian Kota Bandar lampung

Sumber: Peneliti, 2025

Kantor Dinas Perindustrian yang berada di gedung Didukcapil tepatnya di lantai 7, kantor Dinas Perindustrian memiliki 3 bidang. Yang pertama, Bidang kerja sama, pengawasan, dan promosi investasi industri, yang kedua Bidang pembangunan sumber daya industri, yang ketiga Bidang sarana dan prasarana industri.

Setiap bidang di pimpin oleh satu kepala. Kantor Dinas Perindustrian di buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumaat. Untuk setiap Sabtu dan Minggu Dinas Perindustrian melakukan kegiatan wisata kuliner yang dimana setiap minggu nya setiap bidang bergantian untuk bertanggung jawab atas wisata kuliner.



Gambar 3 Payung bantuan Dinas Perindustrian

Sumber:Peneliti (2025)

Payung pada gambar adalah bantuan gratis yang diberikan oleh Dinas Perindustrian kepada para pelaku IKM. Payung ini diberikan untuk membantu para pedagang saat menjual barang, terutama saat berjualan di luar ruangan seperti di bazaar atau pasar rakyat. Selain itu digunakan untuk melindungi diri dari panasnya matahari dan hujan, payung ini juga membuat tempat berjualan terlihat lebih rapi dan nyaman. Terdapat tulisan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang menandakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk program pemerintah terhadap para pelaku IKM agar dapat berjualan dengan lebih baik dan aman tanpa perlu mengeluarkan biaya lebih.

Para pelaku IKM yang sedang berjualan di lahan yang sudah disediakan. Kegiatan penjualan ini dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Pada hari tersebut, para pelaku IKM menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Suasana yang ramai memperlihatkan bahwa banyak orang datang, sehingga kegiatan ini membantu pelaku IKM meningkatkan pendapatan sekaligus membantua aktivitas ekonomi di sekitar mereka.

4.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian

1. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

4.3.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas utama yaitu sebagai pemimpin, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang meliputi kerja sama industri, pengawasan dan promosi investasi, pembangunan sumber daya industri, penyediaan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas berfungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, menyusun perencanaan program, melaksanakan pelayanan publik, melakukan koordinasi lintas instansi, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekertariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan memiliki tugas utama yaitu mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja. Sekretariat menjalankan fungsi perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, pengelolaan kepegawaian, tata usaha, dokumentasi, hubungan

masyarakat, serta pengelolaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang masing-masing melakukan perannya sebagai perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta administrasi umum.

3. Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri

Bidang ini bertugas menyusun, menjalankan, memantau, dan melaporkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kerja sama industri, pengawasan usaha industri, serta promosi investasi. Kegiatannya meliputi pengelolaan kerja sama dengan berbagai pihak, bantuan dalam proses perizinan usaha, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku industri, pemberian sanksi administratif jika terjadi pelanggaran, serta pelaksanaan promosi investasi di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang menangani pekerjaan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing

4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri berperan menyiapkan dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pengembangan tenaga kerja industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta penerapan teknologi industri. Bidang ini berperan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri, mendorong inovasi produk, serta mendukung pemanfaatan teknologi guna meningkatkan daya saing industri daerah.

5. Bidang Sarana dan Prasarana Industri

Bidang ini bertugas melaksanakan kebijakan daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, pengembangan kawasan industri, penyediaan infrastruktur pendukung, pembinaan industri hijau, penerapan standar industri, serta pengelolaan sistem informasi industri daerah. Bidang Sarana dan Prasarana Industri memiliki peran penting dalam menyediakan fasilitas dan sistem pendukung yang dibutuhkan agar kegiatan industri di daerah dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan kebutuhan dinas. Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan fungsi UPT ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota, sehingga bersifat secara fleksibel mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan publik di bidang perindustrian.

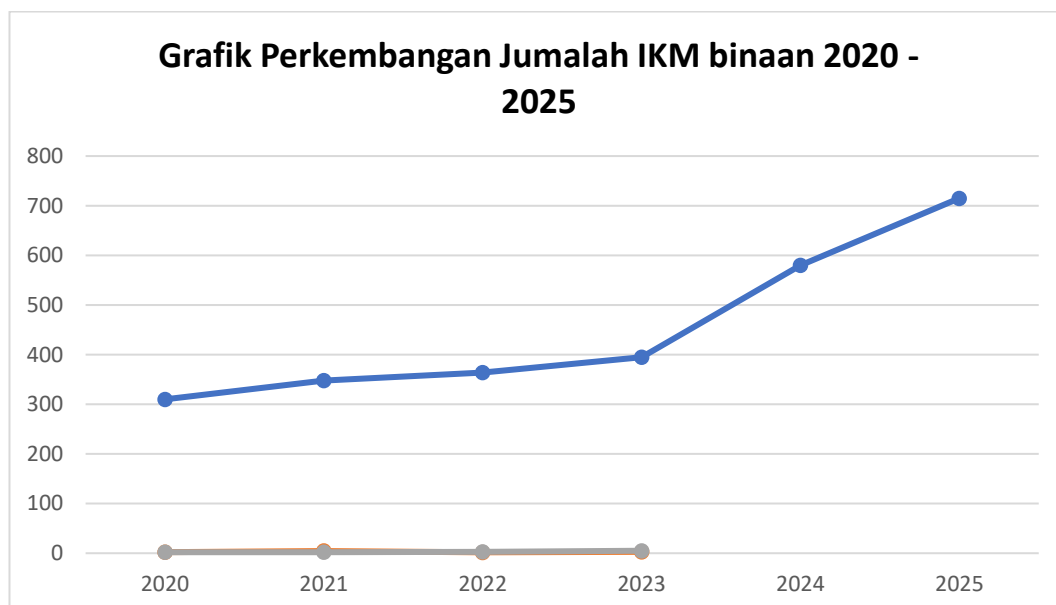
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang masing-masing dan kebutuhan organisasi. Bidang ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4 Gambaran Umum Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah. Keberadaan IKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui aktivitas produksi dan distribusi yang dijalankan, IKM turut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. IKM di Kota Bandar Lampung tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik usaha yang beragam. Sebagian besar pelaku IKM merupakan usaha keluarga atau usaha perorangan yang dijalankan secara mandiri dengan skala produksi yang relatif kecil. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang mampu bertahan dan berkembang melalui inovasi produk serta pemanfaatan peluang pasar lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa IKM memiliki

kemampuan dalam menghadapi perubahan ekonomi. Perkembangan tersebut juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah pelaku IKM dalam beberapa tahun terakhir



Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Jumlah IKM Binaan Tahun 2020–2025

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, 2025

Berdasarkan grafik di atas, jumlah IKM yang dibina oleh Dinas Perindustrian menunjukkan turun naiknya angka. Pada tahun 2021 sebanyak 31 IKM yang menjadi binaan. Namun, pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan menjadi 16 IKM. Penurunan ini berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19 yang pada tahun tersebut masih memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk sektor usaha kecil dan menengah. Pembatasan aktivitas masyarakat serta ketidakstabilan kondisi ekonomi menyebabkan baik pihak dinas maupun pelaku IKM mengalami keterbatasan dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan usaha secara optimal.

Namun, pada tahun-tahun selanjutnya jumlah IKM binaan kembali menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat, partisipasi pelaku usaha dalam program pembinaan kembali meningkat. Hingga tahun 2025, total jumlah IKM yang terdaftar sebagai binaan mencapai 716 pelaku IKM. Peningkatan ini

menunjukkan adanya pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik dalam sektor IKM di Kota Bandar Lampung, sekaligus menandakan bahwa peran pembinaan yang dilakukan pemerintah mulai kembali berjalan secara lebih stabil dan efektif.

Jenis usaha IKM di Kota Bandar Lampung meliputi berbagai sektor, antara lain makanan dan minuman, kerajinan tangan, fashion, pengolahan hasil pertanian, serta produk kreatif lainnya. Sektor makanan dan minuman menjadi salah satu bidang yang paling dominan, seiring dengan tingginya permintaan pasar terhadap produk kuliner lokal. Selain itu, sektor kerajinan dan fashion juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam memanfaatkan potensi budaya dan kreativitas masyarakat setempat.

Meskipun memiliki potensi besar, pelaku IKM di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha. Keterbatasan modal menjadi salah satu permasalahan utama yang menghambat peningkatan kapasitas produksi dan pengembangan usaha. Sebagian besar pelaku IKM masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, sehingga ruang gerak untuk ekspansi usaha menjadi terbatas.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku IKM juga masih relatif rendah, terutama dalam hal manajemen usaha, pemasaran, dan penguasaan teknologi. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki keterampilan administrasi yang memadai, seperti perencanaan produksi, dan strategi pemasaran. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing produk di pasar yang semakin meningkat.

Tantangan lainnya datang dari keterbatasan akses pasar. Sebagian besar produk IKM masih dipasarkan secara lokal dengan jangkauan yang terbatas. Kurangnya pemanfaatan media digital dan platform pemasaran online menyebabkan produk IKM sulit masuk ke pasar yang lebih luas. Meskipun, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi pelaku IKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan Jumlah penjualan.

Pemanfaatan teknologi produksi juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Banyaknya pelaku IKM yang masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga kapasitas produksi terbatas dan kualitas produk kurang konsisten. Hal ini berdampak pada kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar dan standar mutu yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan IKM tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menjadi sangat penting dalam memberikan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi yang berkelanjutan. Program pelatihan, bantuan permodalan, penyediaan sarana produksi, serta akses pemasaran merupakan strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku IKM.

Dengan adanya pembinaan yang terarah dan terus-menerus, diharapkan pelaku IKM mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pemasaran, serta mengelola usaha secara lebih terampil. Dengan ini, IKM tidak hanya menjadi sektor pendukung ekonomi, serta menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

VI. Kesimpulan dan Saran

6.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah berkembang menjadi aktor strategis dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peran ini diwujudkan melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi legalitas, penyediaan sarana produksi, serta pembukaan akses pasar yang secara langsung membentuk kapasitas dan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Namun efektivitas peran tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan program pemerintah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi pelaku IKM, seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi daya beli. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pengembangan IKM tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada respons dan kemampuan adaptasi pelaku usaha serta dukungan lingkungan sosial-ekonomi.

Dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, temuan ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara struktur dan agensi (*duality of structure*). Dinas Perindustrian sebagai struktur menyediakan aturan, program, dan sumber daya yang menjadi dasar bagi pelaku IKM untuk bertindak. Di sisi lain, tindakan dan respons pelaku IKM dalam memanfaatkan program tersebut turut memengaruhi keberhasilan serta keberlanjutan kebijakan yang dijalankan.

6.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan yakni:

1. Untuk Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Bandar Lampung masih memiliki keterbatasan dalam kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri. Selain itu, akses pasar yang dimiliki pelaku IKM juga masih bergantung pada fasilitasi pemerintah, terutama melalui kegiatan bazar dan promosi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian. Berdasarkan penelitian ini, Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program pembinaan, khususnya dalam penguatan kemampuan pelaku usaha serta pemanfaatan teknologi digital, serta memperluas akses pasar yang lebih mandiri dan berkelanjutan agar pelaku IKM tidak terus bergantung pada program pemerintah.

2. Untuk Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kurang aktif dalam memanfaatkan program pembinaan yang telah disediakan serta memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya legalitas usaha, karena masih adanya anggapan bahwa legalitas merupakan beban. Selain itu, pelaku usaha juga cenderung belum optimal dalam membangun kerja sama dan jaringan antar sesama IKM, sehingga daya saing dan peluang usaha belum berkembang secara maksimal. Berdasarkan penelitian ini, pelaku IKM disarankan untuk lebih aktif mengikuti program pembinaan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha sebagai sarana memperluas akses pasar dan pendampingan, serta mulai membangun kerja sama dan jaringan usaha guna memperkuat daya saing dan memperluas peluang usaha.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap intervensi pemerintah, khususnya dalam hal pemasaran produk, sehingga kemandirian usaha belum berkembang secara optimal. Berdasarkan Penelitian ini, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi penguatan pasar IKM secara mandiri serta peran teknologi digital dalam pengembangan usaha, guna melengkapi hasil penelitian ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait upaya peningkatan kemandirian pelaku IKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, N., & Sitania, F. D. (2024). Sinkronisasi Data Terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan IKM Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Teknik Industri (JATRI)*, 2(1), 63–70. <https://doi.org/10.30872/jatri.v2i1.1234>
- Ashaf, Firman, A. (2006). Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif. *Sosiohumaniora*, 8(2), 205–218.
- Bay, E. S., Nasir, M. A., & Yusup, M. (2025). *Peran Dinas Perindustrian Terhadap Industri Kecil Menengah di Nusa Tenggara Barat Perspektif Ekonomi Islam*. 10(2), 409–433.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). Kota Bandar Lampung dalam angka 2025. BPS Kota Bandar Lampung.
- Ekonomika, F., Bisnis, D. A. N., & Diponegoro, U. (2012). *BAGI KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM (Studi Kasus : KPUM di Kelurahan Pekunden , Kecamatan*.
- Food, H., Economy, C., Alhada, M., Habib, F., & Pemasaran, K. (2024). *Pembinaan umkm dalam aspek komunikasi pemasaran sebagai wujud pemberdayaan perempuan di sekitar kawasan wisata pantai*. 04(01), 85–100.
- Fauzan, A. M. (2025). *Kemenperin catat industri kecil menengah serap 13,11 juta tenaga kerja*. ANTARA.
- Harahap, H. (2022). *Pengaruh hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus Pada 3 Pasangan Suami-Istri Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*. 1–84.
- Hartono, D., & Moeis, J. P. (2025). *The Effect Of Participation In Cooperatives On The Turnover Of Micro And Small Industries In Indonesia Pengaruh Partisipasi Pada Koperasi Terhadap Omzet Industri Mikro Kecil Di Indonesia*. 6(6), 206–217.

- Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). *PENURUNAN DAYA BELI MASYARAKAT SELAMA RAMADAN DAN LEBARAN 2025 : STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG*. 17(2), 141–146.
- Laia, A., Lase, D., Waruwu, S., & Buulolo, N. A. (2024). *Evaluasi Pelatihan Keterampilan di Kantor Dinas Perindustrian dan Koperasi , Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli*. 2, 14–31.
- Mirani, D., & Aryansah, J. E. (2021). *Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang Implementation of the Culinary Sector Micro Small Medium Enterprises Development Program in Palembang City*. 9(1), 38–46.
- Muh. Ridwan, Hartutiningsih, M. H. (2014). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang* Muh. Ridwan 1 , Hartutiningsih 2 , Mass'ad Hatuwe 3. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 187–199.
- Nurhayati, S. (2018). *Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Kota Surakarta*. *PC Magazine*, 18(4), 195.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=1508613&%0Alang=ja&site=ehost-live>
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). *Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Riyan Tika Syafitri, R. T. S. (2023). *Peran dinas perdagangan dan perindustrian dalam memajukan industri kecil menengah (IKM) di kota Tanjungpinang tahun 2022*. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(2), 134–146. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i2.2044>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Suganda, Y., & Eriyanti, F. (2024). *Tingkat Kesadaran Pelaku IKM Perikanan*

- Dalam Sertifikasi Pirt dan Halal di Kabupaten Pesisir Selatan. 05(02), 1–14.*
- Vivaldy, A. (2023). *Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*
- Wahyudi, R. (2022). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(5), 671–676.* <https://doi.org/10.544443/sibatik.v1i5.75>
- Wardani, H. K. (2016). *Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang).* Brawijaya University.